

Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Kelisamba

Dominikus Rangga Hayon¹, Richardus B. Toulwala²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, STPM Santa Ursula

e-mail: pionoyah@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan perempuan adalah hal yang sangat penting untuk memberdayakan kaum perempuan dalam pembangunan. Isu ini menjadi penting ketika perempuan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial budaya dipandang sebelah mata. Dampaknya adalah perempuan tidak mampu memimpin atau mengelola sebuah program ketika kepada mereka dilimpahkan tanggung jawab dalam hidup berkelompok dan berorganisasi. Hal seperti ini terjadi pada kelompok PKK dan Posyandu di Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, NTT. Setelah terjun ke dalam kelompok PKK dan Posyandu, para anggota yang adalah para perempuan tidak mampu menjalankan organisasi tersebut dan bahkan tidak bisa merencanakan program dan melaksanakannya. Kondisi ini mendorong tim pengabdian masyarakat STPM St. Ursula melakukan fasilitasi pemberdayaan perempuan di kelompok tersebut melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan pelatihan pengelolaan program. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemimpinan, pemahaman akan Tupoksi, serta menumbuhkembangkan keterampilan pengelolaan program. Kegiatan yang berlangsung selama 1 minggu ini menyimpulkan bahwa fasilitasi pemberdayaan kaum perempuan sangat penting dalam memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan. Selain itu, melalui kegiatan tersebut, PKK dan Posyandu kembali berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan melalui optimalisasi perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Kata kunci: Pemberdayaan, Perempuan, PKK, POSYANDU

Abstract

Empowerment of women is very important to empower women in development. This issue becomes important when women's position in socio-cultural life is underestimated. The impact is that women are unable to lead or manage a program when they are assigned responsibility for living in groups and organizations. Something like this happened to the PKK and Posyandu groups in Kelisamba Village, Ndori District, Ende Regency, NTT. After joining the PKK and Posyandu groups, the members who are women are unable to run the organizations and cannot even plan programs and implement them. This condition prompted the STPM St. Ursula community service team. Ursula facilitated women's empowerment in the group through strengthening leadership capacity and main tasks and functions, and program management training. This activity is carried out to increase knowledge about leadership, understand the main tasks and functions, and develop program management skills. The activity which lasted for 1 week concluded that facilitating women's empowerment is very important in strengthening women's position in development. In addition, through these activities, the PKK and Posyandu function again as women's empowerment institutions through optimizing program planning, implementation, monitoring, and evaluation.

Keywords: Empowerment, Women, PKK, POSYANDU

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu. Kelompok PKK dan Posyandu merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, pendampingan, dan pengembangan jaringan kerja. Dalam hal ini, manajemen program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Manajemen program yang baik dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu, sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat sekitar 133,54 juta perempuan di Indonesia, yang merupakan sekitar 49,42% dari total populasi Indonesia (BPS, 2020, <https://www.bps.go.id/website>). Meskipun jumlah perempuan di Indonesia cukup besar, namun masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia.

Sebagai bagian dari wilayah kestuan Republik Indonesia, posisi perempuan di panggung politik dan tata kelola pemerintah di NTT juga sama. Mereka selalu terpinggirkan dan dipinggirkan. Segala macam persoalan keterpinggiran perempuan dalam sejarah dan masyarakat bermula pada formasi struktur kuasa feodalisme politik patriarki. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi ketidakberdayaan (Helenerius Ajo Leda, 2020). Terhadap masalah ini maka pemberdayaan perempuan menjadi upaya yang harus dilakukan di daerah NTT dan pelosok lokalitasnya.

Program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemberdayaan perempuan. Kelompok PKK dan Posyandu merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kelompok PKK merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, sedangkan Posyandu merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu, pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, pendampingan, dan pengembangan jaringan kerja. Dalam hal ini, manajemen program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut (Kemenpppa, 2019, <https://www.kemenpppa.go.id/>).

Pengelolaan program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program, serta pengembangan jaringan kerja. Dalam perencanaan program, manajemen program harus memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, manajemen program juga harus memastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Sari & Kurniawan, 2019, 4).

Subyek dari kegiatan pengabdian ini kelembagaan PKK dan Posyandu di Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende. Secara geografis, Desa Kelisamba berada di wilayah Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende. Desa Kelisamba sendiri memiliki luas

wilayah = 2.085,24 km² (BPS 2022) dengan Kode Wilayah Administrasi = 53.08 dengan jumlah penduduk 585 orang dengan jumlah laki-laki 288 dan perempuan 297. Desa Kelisamba sendiri memiliki dua dusun yaitu dusun Masebewa dan Audoa. Dari aspek pendidikan, desa Kelisamba terdapat satu Kober, satu Sekolah Dasar dan satu SMP Satap.

Dalam pelaksanaan program, manajemen program harus memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, manajemen program juga harus memastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana program. Monitoring dan evaluasi program juga menjadi sangat penting dalam manajemen program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu. Monitoring dan evaluasi program dapat membantu manajemen program dalam mengetahui sejauh mana program tersebut telah berhasil dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Namun sistem pengelolaan program pemberdayaan perempuan yang terjadi di Desa Kelisamba belum berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi secara khusus di Desa Kelisamba. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat secara khusus perempuan dalam kegiatan PKK dan Posyandu menjadi kendala sosial yang tak dapat dihindari dan membuat pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan, peran kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan. Manajemen program pemberdayaan perempuan pada kelompok PKK dan Posyandu menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pada kelompok PKK dan Posyandu.

METODE

Dalam rangka membangun kesadaran perempuan tentang tanggung jawabnya sebagai anggota PKK dan Posyandu, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Tahap Awal

Tahap awal yang dilakukan adalah tim pengabdian kepada masyarakat menghubungi Pemerintah Desa Kelisamba untuk menawarkan kerjasama dalam membangun kesadaran perempuan anggota PKK dan Posyandu untuk mampu mengelola program-program. Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk MoU.

Tahap Intervensi

Setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah :

Penguatan Kapasitas tentang Kepemimpinan dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Penguatan kapasitas dalam bentuk ceramah dan FGD ini ditujukan kepada anggota PKK dan Posyandu yang adalah kelompok perempuan. Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar anggota memiliki pengetahuan, kepemimpinan dalam memimpin sebuah organisasi kerja. Kegiatan ini bertujuan agar para anggota dapat memiliki jiwa kepemimpinan dalam memimpin sebuah organisasi.

Pelatihan Pengelolaan Program

Langkah ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat untuk melatih kecakapan, keterampilan dalam mengelola program-program PKK dan Posyandu. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat kemampuan mereka dalam mengelola program-program kerja.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

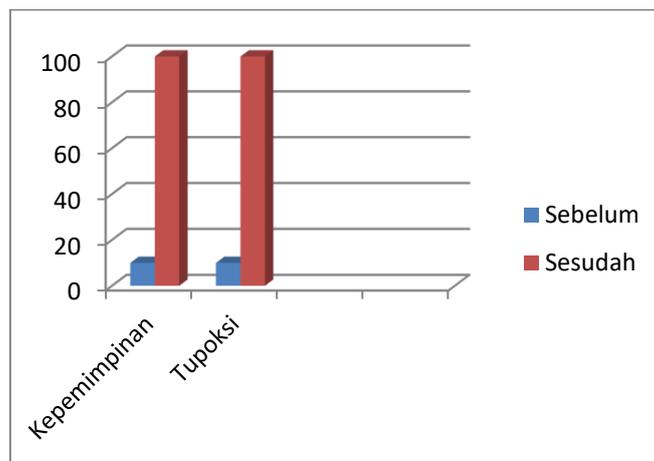
Tahap ini dilakukan mengarah pada hasil yang dicapai setelah dilaksanakan penguatan kapasitas dan pelatihan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menemukan berapa jumlah anggota yang memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengorganisasi kelompok dan terampil mengelola program-program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya memberdayakan anggota PKK dan kader Posyandu, tim pengabdian masyarakat terlebih dahulu menyentuh kesadaran mereka tentang pentingnya *skill* kepemimpinan dan keterampilan pengelolaan program-program. Dalam menggugah kesadaran ini, tim pengabdian masyarakat mengawali dengan memperlihatkan alasan-alasan yang menunjukkan betapa pentingnya kemampuan memimpin sebuah organisasi dan keterampilan mengelola program-program. Selanjutnya anggota PKK dan kader Posyandu diberikan pelatihan dan bimbingan tentang manajemen program.

Penguatan Kapasitas tentang Kepemimpinan dan Tupoksi

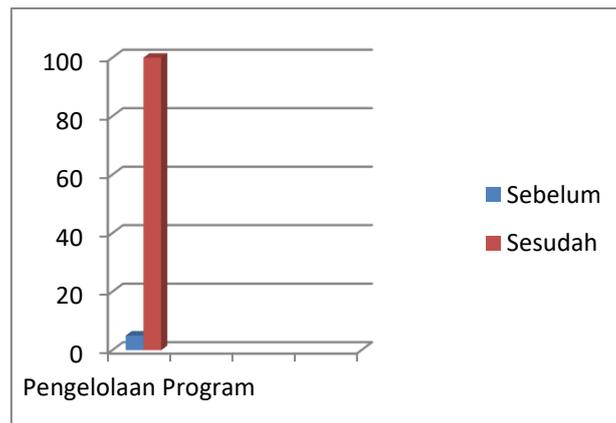
Dalam kegiatan ini tim pengabdian masyarakat menemukan sekitar 10% peserta yang tidak memahami kepemimpinan dan Tupoksi baik dalam Pokja di PKK maupun pada divisi-divisi dalam Posyandu. Namun setelah mengikuti penguatan kapasitas tentang kepemimpinan dan penjelasan tentang Tupoksi masing Pokja dan Divisi, pemahaman anggota PKK dan kader Posyandu tentang kepemimpinan dan Tupoksi mengalami peningkatan. Jika sebelum dilaksanakan penguatan kapasitas, kenyataan memperlihatkan hanya 10% peserta yang memahami tentang kepemimpinan dan Tupoksi, maka setelah mengikuti penguatan kapasitas ini, 100% peserta sudah memahami pentingnya kepemimpinan dan Tupoksi. Data ini diperoleh dengan cara dilakukan pra tes dan post test. Perubahan pemahaman ini dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar 1. Perubahan pemahaman

Pelatihan Pengelolaan Program Kerja

Dalam memberikan pelatihan, tim pengabdian masyarakat menggunakan metode ruang kelas seperti perkuliahan, konferensi, studi kasus, bermain peran dan pengajaran berprogram (*programmed instruction*). Para peserta dibimbing untuk melakukan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, hingga mekanisme evaluasi. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta menunjukkan peningkatan keterampilan dalam merencanakan dan mengelola sebuah program. Kenyataan ini dijumpai pada upaya merencanakan program kerja PKK dan Posyandu. Sebelum pelatihan hanya 5% peserta yang secara samar-samar mengetahui upaya merencanakan program, tetapi setelah mengikuti pelatihan, semua anggota (100%) mengakui bahwa mereka sudah memiliki pemahaman tentang perencanaan program secara baik. Hal ini dapat diperhatikan pada diagram berikut ini:



Gambar 2. Perubahan kemampuan perencanaan

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap para peserta dilakukan setelah dilaksanakannya pelatihan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan ditemukan bahwa setelah mengikuti pelatihan ada 100% anggota yang mampu membuat perencanaan program sesuai dengan arahan. Sedangkan sebelum mengikuti pelatihan banyak peserta pelatihan yang tidak memahami pentingnya kepemimpinan, Tupoksi, dan mampu merencanakan program dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa peserta pelatihan tidak saja berupaya untuk memahami arti kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan Tupoksinya, tetapi mereka juga berupaya untuk membuat rancangan perencanaan secara matang.

Data yang ditampilkan di atas memperlihatkan adanya kaitan antara pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan program dengan peningkatan pemahaman akan kepemimpinan dan Tupoksi serta cerdas dalam mengelola program. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku para anggota. Setelah mengikuti pelatihan tersebut para anggota kedua kelompok tersebut antusias menganalisis kebutuhan mereka kemudian mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program yang jelas dan terperinci. Selanjutnya perencanaan tersebut diusulkan ke tingkat pemerintah desa agar dianggarkan pendanaannya.

Selain itu, pelatihan tersebut telah membawa manfaat bagi kedua organisasi PKK dan Posyandu. Mereka melakukan pembenahan administrasi, sistem manajerial dan mutasi anggota dalam setiap Pokja dan divisi sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Lebih dari pada itu kelompok PKK kembali berfungsi menjadi motor penggerak aktivitas pemberdayaan di Desa Kelisamba sebagaimana menjadi tujuan organisasi ini. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam kelompok PKK dan Posyandu telah membawa manfaat, baik bagi anggota maupun bagi kedua organisasi tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan dalam PKK dan Posyandu dalam rangka membangun kesadaran berorganisasi dan mengelola program telah membawa manfaat bagi anggota dan organisasi. Kegiatan ini berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan dalam berorganisasi, pemahaman terhadap Tupoksi, dan terampil dalam mengelola program. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat bagi kelangsungan organisasi baik PKK maupun Posyandu. Keuntungan bagi para peserta adalah mereka mampu memimpin sebuah kelompok/organisasi dan mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program-program di dalam kelompok tersebut. Di lain pihak secara organisatoris, PKK dan Posyandu kini kembali menjadi wadah pemberdayaan yang baik bagi para perempuan di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada Pemerintah Desa Kelisamba dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula yang telah memberikan dukungan baik berupa program pengabdian masyarakat maupun dukungan finansial terhadap kegiatan ini. Kontrak kegiatan ini dituangkan dalam surat MoU nomor Pem.140/127/V/DK/2023 Selain itu tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut serta mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan berjalan dengan sukses dan mampu membawa hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan., (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- George R. Terry, (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Georg R. Terry (2010). The Management Of Human Resource Development Based On The Action, Planning, Organizing, And Controlling. *Jurnal Manajemen*, 10(2), pp. 129-142.
- George R.Terry, dan Leslie W. Rue (2010). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Helenerius Ajo Leda. (2020). Memperkuat Gerakan Perempuan NTT di Era New Normal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 74(107), 29–55.
<http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE09873547>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak Melalui Kelompok PKK. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c73cb-permen-no-8-thn-2019-ttg-renstra-kpppa.pdf>
- Kementerian Kesehatan. (2018). Pedoman Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Jakarta: Kementerian Kesehatan. <https://promkes.kemkes.go.id/pedoman-umum-pengelolaan-posyandu>
- Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143402/permendagri-no-36-tahun-2020>
- Sari, D. P., & Kurniawan, A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok PKK di Desa Tegalrejo Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(2), 1-11.
- Wasisto, H. (2013). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama